



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LKj-IP)
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta rasa syukur kami haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan RidhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Tahun 2022 dapat diselesaikan, dan tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) ini.

Disadari sepenuhnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) RSUD Kota Dumai tahun 2022 disusun dengan segala keterbatasan. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan laporan ini diharapkan masukan dan saran, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) ini dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja dan sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja di RSUD Kota Dumai.

Dan ucapan terimakasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membangun dan memperbaiki kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dalam mewujudkan visi dan misi RSUD Kota Dumai

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) RSUD Kota Dumai tahun anggaran 2022 ini dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Kota Dumai untuk menjalankan tugasnya sebagai institusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai.

Dumai, Januari 2023
Direktur RSUD Kota Dumai

drg.RIDHONALDI

NIP.19710312 200012 1 007

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesehatan Nasional, Khususnya di Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di daerah ini telah meletakkan pondasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) pada sasaran yang akan di capai oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang menjangkau seluruh Masyarakat kota Dumai, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka akuntabilitas kinerja periode tahunan merupakan perwujudan kewajiban Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RKT dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah kota Dumai.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pejabat eselon II ke atas berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun

sebelumnya. Adapun tata cara penyusunan pelaporan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai.

Laporan Kinerja (LKj) Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai Tahun 2022 merupakan suatu media pertanggungjawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program bidang Kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2022

2. Maksud dan tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan dipemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LKj ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel .

Esensi dari sistem AKIP bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di sektor Kesehatan di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan dan Sub Kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

3. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai yaitu :

1. Masih belum memadai Sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) kota Dumai.
2. Masih Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia Kesehatan di Rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Dumai.
3. Kurangnya Dokter spesialis dan sub spesialis yang kurang memadai (diantaranya dokter spesialis Syaraf, Dokter Spesialis Urologi, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik) ;

4. Belum adanya fasilitas pendaftaran secara online bagi pasien yang akan berobat ke Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kota Dumai.

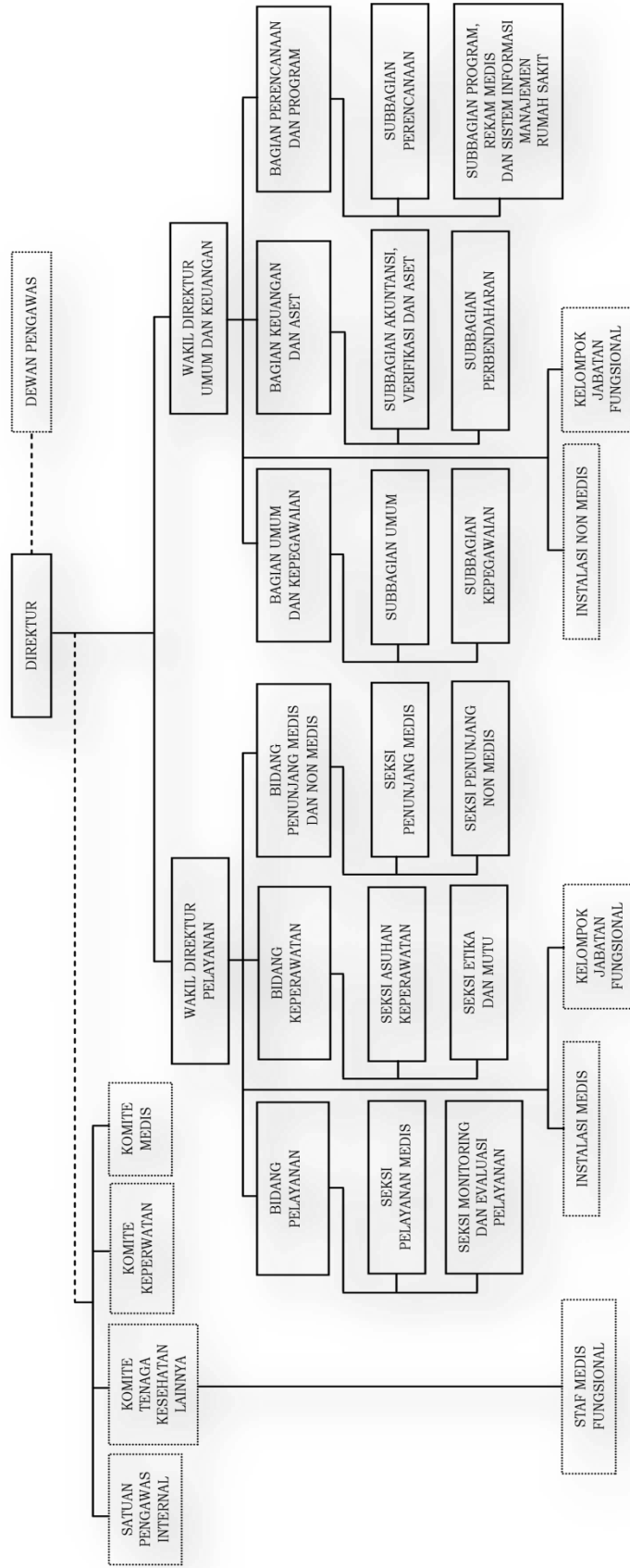
4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai No. 75 Tahun 2020 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah pada Dinas kesehatan Kota Dumai. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan. Susunan Organisasi RSUD Kota Dumai terdiri dari :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - Intalasi Non Medis
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Kepala Bagian Keuangan dan Aset
 - 1). Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Aset
 - 2). Kepala Subbagian Perbendaharaan
 - b. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1). Kepala Subbagian Umum
 - 2). Kepala Subbagian Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Perencanaan dan Program
 - 1). Kepala Subbagian Perencanaan
 - 2). Kepala Subbagian Program, Rm dan SIMRS
3. Wakil Direktur Pelayanan
 - Intalasi Medis
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Kepala Bidang Pelayanan
 - 1). Kepala Seksi Pelayanan Medis
 - 2). Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
 - b. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
 - 1). Kepala Seksi Penunjang Medis
 - 2). Kepala Seksi Seksi Penunjang Non Medis
 - c. Kepala Bidang Keperawatan
 - 1). Kepala Seksi Asuhan Keperawatan
 - 2). Kepala Seksi Etika dan Mutu

a) GAMBAR : 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI**



Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian pada Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) kota Dumai adalah sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Sampai akhir bulan Desember 2022 Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) kota Dumai tercatat PNS berjumlah 313 orang yang terdiri dari :

Tabel:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.

NO	PANGKAT	GOL. RUANG	JUMLAH ORANG
1	Pembina Utama	IV/e	4
2	Pembina Utama Madya	IV/d	2
3	Pembina Utama Muda	IV/c	2
4	Pembina Tk.I	IV/b	6
5	Pembina	IV/a	29
6	Penata Tk.I	III/d	79
7	Penata	III/c	70
8	Penata Muda Tk.I	III/b	70
9	Penata Muda	III/a	13
10	Pengatur Tk.I	II/d	14
11	Pengatur	II/c	23
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
JUMLAH			313

5. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

2.1.1. Visi Pembangunan Kota Dumai

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”*.

Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Visi Provinsi Riau dan bertolak pada kondisi maka ditetapkan visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- a. Masyarakat Dumai Yang Makmur, keadaan masyarakat Kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin.

Arti kata :

- 1) Layak ; wajar pantas ; patut ; mulia ; terhormat
- 2) Lahir ; keduniaan ; jasmani
- 3) Bathin ; sesuatu yang terdapat di dalam hati ; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

- b. Masyarakat Dumai yang madani ; Keadaan masyarakat Kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.

Arti Kata :

1. Nilai ; Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
2. Norma ; Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima ; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu ;
3. Hukum ; Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
4. Berperadaban ; Yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin ; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa;

- c. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi kedua mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kota Dumai. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 adalah "**Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani Yang Hijau**" diwujudkan melalui Visi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi Menjadikan **Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)**.

Tabel berikut menyajikan keselarasan dan konsistensi serta hubungan antara misi pada RPJPD Kota Dumai dengan misi RPJMD.

Misi RPJPD Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Tahun 2021-2026	
Misi 1:	Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industry	Misi 1:	Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
Misi 2:	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu	Misi 2:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu
Misi 3:	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Misi 3:	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi RPJPD Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Tahun 2021-2026	
	sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Misi 5:	Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.		
Misi 4:	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.	Misi 4:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita

- b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - c) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
2. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
 - d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan
3. Mewujudkan infrastruktuktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktuktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya infrastruktuktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktuktur daerah;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

- b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Dumai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang menjangkau seluruh Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)	%	80	75	75	75	75	75	75
			ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	5	5	5	5	5	5
			TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1,5	2	2	2	2	2
			BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65	45	45	45	45	45	45
			NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20	20	20	20	20	20	20

2.1.4. Strategis, arah kebijakan, Program dan Indikator kinerja.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.1.5. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomia Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada pelabuhan dan industri dengan strategi.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu dengan Strategi.
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas dengan strategi.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kpemerintahan daerah yang baik dengan strategi.

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro,kecil menengah(UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.1.7. Program untuk pencapaian sasaran.

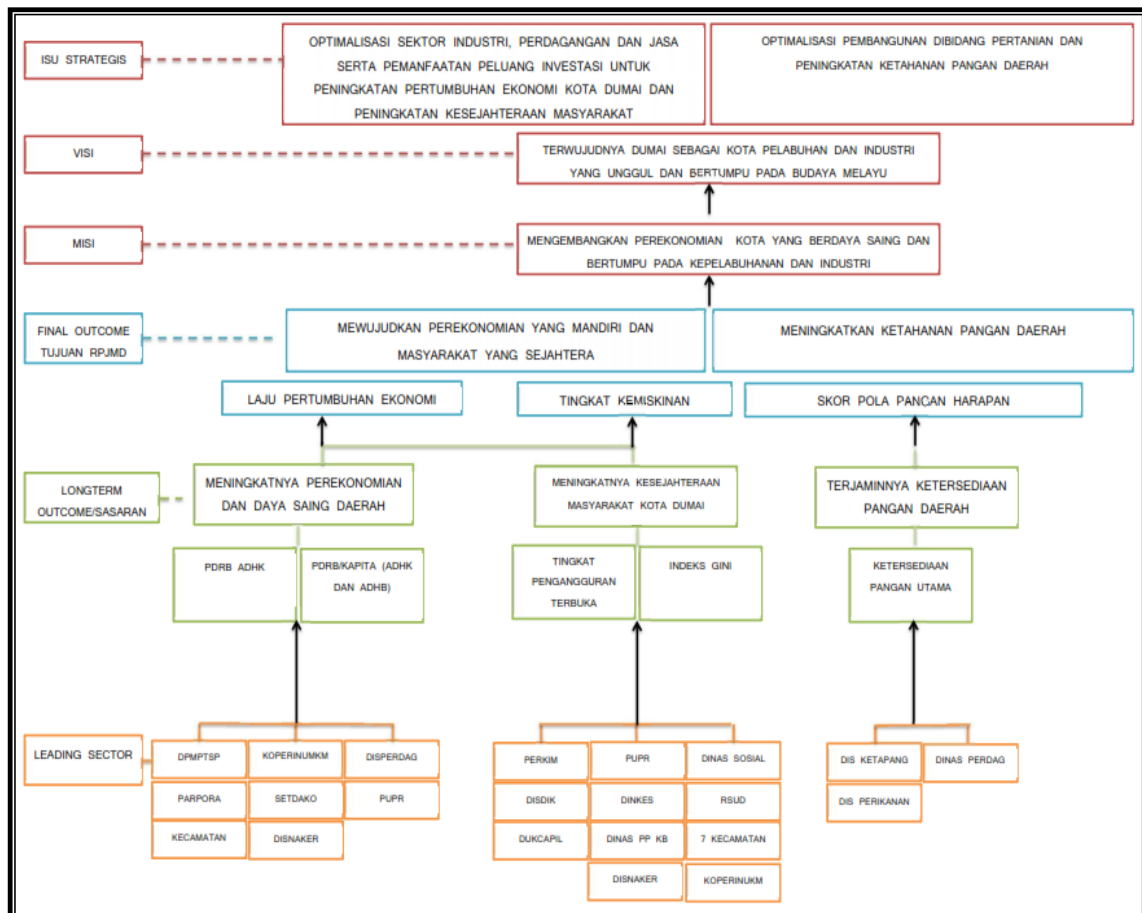
Berdasarkan visi, misi tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022.

Tabel 2.2. Program untuk pencapaian sasaran tahun 2022

No.	SASARAN	JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	3 Program

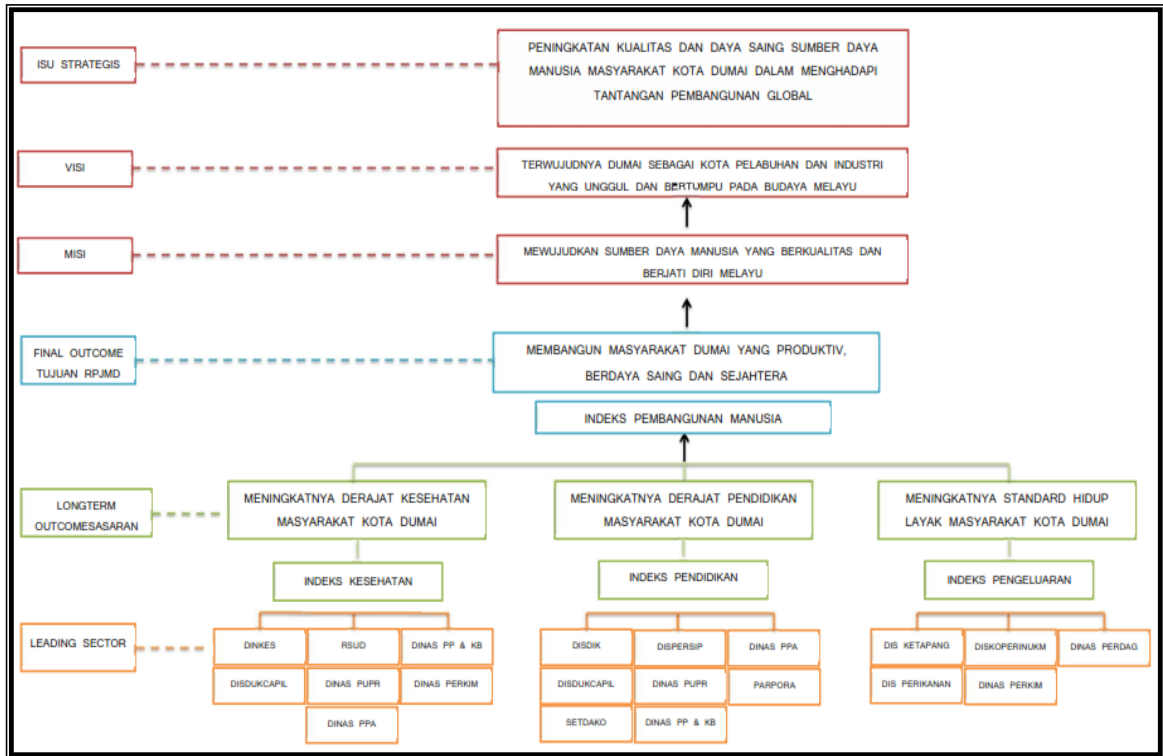
Selanjutnya Untuk mencapai target misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.1 Pemetaan Kinerja Misi 1



Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2



2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam menentukan tingkat capaian Kinerja organisasi dan Realisasi anggaran tahun 2022, perlu di buat suatu perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Kota Dumai sebagai perpanjangan tangan kinerja Pemerintah kota Dumai. Perjanjian Kinerja yang telah di sepakati antara RSUD Kota Dumai Tahun 2022 dengan Pemerintah Kota Dumai tertuang dalam Tabel 2.3. Rencana Kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran StrategiS	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	4
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	45
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	34
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	24

Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang di tuangkan dalam Program dan Kegiatan pada RSUD Kota Dumai.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	9 Keg		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 242.190.818.059
				1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp 98.275.900
				1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp 40.861.691.712,00
				1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	Rp 75.600.000,00
				1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp 296.637.400,00
				1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp 1.060.418.979,00
				1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp 37.576.000,00
				1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp 20.351.523.408,00
				1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp 335.600.000,00
				1.9	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	Rp 179.073.494.660,00
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Presentase dukungan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	3 keg		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 68.380.949.104,00
				2.1	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Rp 54.617.024.368,00
				2.2	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 13.529.484.736,00
				2.3	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 234.440.000,00
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	2 Keg		Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Rp 8.850.892.862,00
				3.1	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	Rp 8.639.105.462,00
				3.2	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 211.787.400,00

Dari table Perjanjian Kinerja RSUD Kota Dumai Tahun 2022, memiliki Sasaran, Indikator Kinerja serta target Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel. Serta berorientasi pada kerja yang baik. Dengan demikian Perjanjian kinerja harus terus dilakukan dan harus terus bergerak dalam mencapai indikator Kinerja yang lebih efisien. Hal ini di tunjang oleh Rencana Aksi Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai dalam melakukan kinerja OPD. Berikut di lampirkan Tabel 2,5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja RSUD Kota Dumai Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021				TARGET 2022
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3						4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75	75	75	75	75
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	4	4	4	4	4
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	45	45	45	45	45
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	34	34	34	34	34
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	24	24	24	24	24

Rencana Aksi RSUD Kota Dumai di harapkan memiliki daya ungkit yang besar terhadap capaian dari Rencana Strategis. Untuk itu Strategi yang di tetapkan adalah dengan meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan aspek biaya pengobatan. Sasaran utama yang harus dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Pelayanan yang di maksud adalah Pelayanan yang baik, Rasional, bermutu dan menjamin keberhasilan dalam pelayanan.

Hal ini dapat kita lihat dalam evaluasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel : 2.6. Evaluasi Pengukuran kinerja Indikator Sasaran berkala RSUD Kota Dumai Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SAMPAI DENGAN				TARGET 2022	REALISASI SAMPAI DENGAN				REALISASI 2022
				TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75	75	75	75	75	63.46	60.27	81.49	79.10	71.15
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	4	4	4	4	4	4.67	4.32	4.71	4.38	4.52
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	11.56	11.69	14.95	15.25	53.46
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	45	45	45	45	45	2.84	3.09	1.14	1.26	1.97
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	34	34	34	34	34	25.86	25.84	19.00	23.38	23.23
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	24	24	24	24	24	41.54	44.19	41.84	42.59	42.50

Penjelasan alokasi anggaran persasaran strategis diawali dengan narasi sebagai berikut :

Anggaran belanja langsung pada APBD tahun 2022 Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 319.422.660.025,- yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp. 242.190.818.059,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.255.281.436.558,00 ,- atau 105,41% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

1. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 98.275.900,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.076.000,00,- dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan : 85,29%.

Anggaran : Rp. 48.800.000,-

Realisasi : Rp. 41.619.100,-

Presentase Realisasi : 85,29%.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 91,28%.

Anggaran : Rp. 24.955.900,-

Realisasi : Rp. 22.779.600,-

Presentase Realisasi : 91,28%.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Penyelesaian pekerjaan : 84,33%

Anggaran :Rp. 24.520.000,-

Realisasi :Rp. 20.677.300,-

Presentase Realisasi :84,33%

2. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.861.961.712,00,- dengan realisasi sebesar Rp.37.510.478.577,00,- atau 91,80% dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyelesaian Pekerjaan : 91,80%.

Anggaran : Rp. 40.861.961.712,-

- Realisasi : Rp. 37.510.478.577,-
Presentase Realisasi : 91,80%.
3. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.600.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.800.000,00,- atau 93,65% dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
Penyelesaian Pekerjaan : 93,65%.
Anggaran : Rp. 75.600.000,-
Realisasi : Rp. 70.800.000,-
Presentase Realisasi : 93,65%.
4. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 296.637.400,00,- dengan realisasi sebesar Rp.293.170.000,00,- atau 98,83% dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Penyelesaian Pekerjaan : 98,83%.
Anggaran : Rp. 296.637.400,-
Realisasi : Rp. 293.170.000,-
Presentase Realisasi : 98,83%.
5. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.060.418.979,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.004.772.788,00,- atau 98,52% dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyelesaian Pekerjaan : 99,10%.
Anggaran : Rp. 929.818.979,-
Realisasi : Rp. 921.442.700,-
Presentase Realisasi : 99,10%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Penyelesaian Pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 15.400.000,-
Realisasi : Rp. 15.400.000,-
Presentase Realisasi : 100%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Penyelesaian Pekerjaan : 93,69%
Anggaran : Rp. 115.200.000,-

- Realisasi : Rp. 107.930.088,-
Presentase Realisasi : 93,69%
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.576.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.600.000,00,- atau 94,74% dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Penyelesaian Pekerjaan : 94,74%
Anggaran : Rp. 37.576.000,-
Realisasi : Rp. 35.600.000,-
Presentase Realisasi : 94,74%
7. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.351.523.408,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.508.704.228,00,- atau 95,86% dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Penyelesaian Pekerjaan : 91,78%.
Anggaran : Rp. 4.679.400.000,-
Realisasi : Rp. 4.294.628.228,-
Presentase Realisasi : 91,78%.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyelesaian Pekerjaan : 20,00%
Anggaran : Rp.100.000.000,-
Realisasi : Rp. 20.000.000,-
Presentase Realisasi : 20,00%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Penyelesaian Pekerjaan : 97,57%.
Anggaran : Rp. 15.572.123.408,-
Realisasi : Rp. 15.194.076.000,-
Presentase Realisasi : 97,57%.
8. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 335.600.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.344.696,00,- atau 91,58% dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 Penyelesaian Pekerjaan : 98,19%.
 Anggaran : Rp. 33.560.000,-
 Realisasi : Rp. 32.954.175,-
 Presentase Realisasi : 98,19%.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 Penyelesaian Pekerjaan : 90,85%.
 Anggaran : Rp. 302.040.000,-
 Realisasi : Rp. 274.390.521,-
 Presentase Realisasi : 90,85%.
9. Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 179.073.494.660,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 196.425.490.269,00,- atau 109,69% dengan sub kegiatan :
- Pelayanan dan Peningkatan BLUD.
 Penyelesaian Pekerjaan : 109,69%.
 Anggaran : Rp. 179.073.494.660,-
 Realisasi : Rp. 196.425.490.269,-
 Presentase Realisasi : 109,69%.

b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Jumlah program di anggarkan sebesar Rp. 68.380.949.104,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 56.782.292.751,00,- atau 83,04% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

1. Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.617.024.368,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.984.831.537,00,- atau 87,48% dengan sub kegiatan :
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.
 Penyelesaian Pekerjaan : 62,62%.
 Anggaran : Rp. 12.664.552.572,-
 Realisasi : Rp. 7.930.227.348,-

- Presentase Realisasi : 62,62%.
- Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 84,01%
 - Anggaran : Rp. 951.176.800,-
 - Realisasi : Rp. 799.076.000,-
 - Presentase Realisasi : 84,01%
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 93,67%.
 - Anggaran : Rp. 21.503.511.228,-
 - Realisasi : Rp. 20.141.310.507,-
 - Presentase Realisasi : 93,67%.
 - Pengadaan Obat, Vaksin.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 99,97%.
 - Anggaran : Rp. 7.143.670.391,-
 - Realisasi : Rp. 7.141.660.185,-
 - Presentase Realisasi : 99,97%.
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 99,32%.
 - Anggaran : Rp. 12.054.113.377,-
 - Realisasi : Rp. 11.972.557.497,-
 - Presentase Realisasi : 99,32%.
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 99,79%.
 - Anggaran : Rp. 300.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 299.381.249,-
 - Presentase Realisasi : 99,79%.
2. Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggran sebesar Rp. 13.529.484.736,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.797.461.214,00,- atau 65,02% dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 59,55%.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| Anggaran | : Rp. 10.896.000.000,- |
| Realisasi | : Rp. 6.489.092.328,- |
| Presentase Realisasi | : 59,55% |
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Penyelesaian Pekerjaan	: 98,92%.
Anggaran	: Rp. 2.333.484.736,-
Realisasi	: Rp. 2.308.368.886,-
Presentase Realisasi	: 98,92%.
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp. 300.000.000,-
Realisasi	: -
Presentase Realisasi	: -
3. Pada Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 234.440.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.540.000,- atau 14,31% dengan sub kegiatan :
- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Penyelesaian Pekerjaan	: 14,31%.
Anggaran	: Rp. 234.440.000,-
Realisasi	: Rp. 33.540.000
Presentase Realisasi	: 14,31%

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp. 8.850.892.862,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.7.944.174.786,00,- atau 89,76% yang dialokasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

1. Pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 8.639.105.462,00,- dengan realisasi sebesar Rp.7.753.355.586,00,- atau 89,75% dengan sub kegiatan :
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar.

Penyelesaian Pekerjaan	: 89,75% .
Anggaran	: Rp. 8.639.105.462,-

Realisasi : Rp. 7.753.355.586,-

Presentase Realisasi : 89,75%.

2. Pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 211.787.400,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.819.200,00,- atau 90,10% dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelesaian Pekerjaan : 90,10%.

Anggaran : Rp. 211.787.400,-

Realisasi : Rp. 190.819.200,-

Presentase Realisasi : 90,10%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

A. Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pengumpulan Data Kinerja di arahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap , tepat waktu dan konsisten. Yang berguna sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisien dan efektif.

Secara umum RSUD Kota Dumai telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya Yaitu dari Sasaran strategis yang telah di tetapkan, serta target yang telah disusun untuk Kinerja Tahun 2022, dan dapat dilihat sesuai dengan table berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 beserta Target dan Realisasi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	%
1	2	3				
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75	71,15	94,86
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	4	4.52	113
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1.97	131
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	45	53,46	118,8
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	34	42,5	125
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	24	23,23	96,79

Adapun Penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas adalah sebagai berikut :

a. Persentase Penggunaan Tempat tidur di RSUD (BOR).

BOR (Bed Occupancy Ratio) Menurut Huffma (1994) adalah : ‘ The Ratio of Patient Service Days to inpatient bed count days in a period under consideration ‘. Sedangkan menurut Depkes RI (2005) BOR adalah Presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.

Angka Presentase Tempat Tidur yang di gunakan di RSUD Kota Dumai selama Tahun 2022 adalah : 75%. Sedangkan Realisasinya adalah : 71,15%. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah di buat yaitu sebesar 75%. Namun demikian angka tersebut masih memenuhi standar indicator Depkes 2005 yaitu dimana angka standar ideal BOR menurut Depkes 2005 adalah 60 – 85%. Dan hal ini menggambarkan bahwa perlu peningkatan Sarana dan Prasarana serta peningkatan pelayanan yang lebih baik.

b. ALOS, Lamanya seorang pasien di rawat di RSUD Kota Dumai.

ALOS menurut Huffman (1994) adalah : ‘ The verage hospitalization stay of inpatient discharged during the periode under consideration ‘.

ALOS Menurut Depkes RI (2005) adalah Rata rata lama rawat seorang pasien. Dengan demikian rata rata lamanya seorang pasien di rawat di Rumah Sakit adalah : 4,38 Hari selama tahun 2022. Dengan target Indikator 4 hari. Hal ini terjadi karena sebahagian besar pasien yang di rawat memerlukan perawatan yang lama. Namun demikian hal ini masih dalam batas normal di mana standar ideal ALOS menurut Depkes 2005 adalah 6 – 9 Hari.

c. TOI, Rata rata dimana tempat tidur tidak di tempati dari telah disi sampai saat terisi.

Menurut Depkes Tahun 2005 TOI adalah Rata rata hari dimana tempat tidur tidak di tempati hingga saat terisi berikutnya . Dengan demikian jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi yaitu antara waktu sebuah tempat tidur di tinggalkan pasien, sampai dengan saat di tempati lagi oleh pasien lain berikutnya. Untuk Realisasi TOI RSUD Kota Dumai selama tahun 2022 adalah : 1,97 Hari. Hal ini menunjukkan

bahwa Realisasi TOI Tahun 2022 melebihi target yang di tetapkan. Namun demikian masih dalam batas normal sesuai dengan Standar ideal TOI menurut Depkes 2005 adalah : 1 – 3 hari.

d. BTO, Freqwensi Pemakaian Tempat Tidur.

BTO Menurut Huffman (1994) the net effect change in accupancy rate and length of stay, BTO menurut Depkes 2005 adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Dari target yang telah di tetapkan sebesar 45 kali, Realisasi Tahun 2022 sebesar 53,46 kali. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tempat tidur di RSUD Kota Dumai selama tahun 2022 kurang efisien, dimana batas ideal BTO menurut Depkes 2005 adalah : 40 – 50 kali/ pasien.

e. GDR, (Gross Death Rate) Angka Kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit.

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 Penderita keluar dari Rumah Sakit. Target yang di buat selama Tahun 2022 sebesar : 34. Sedangkan Realisasi GDR selama tahun 2022 adalah : 42,50. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian umum di RSUD Kota Dumai Selama Tahun 2022 lebih besar dari target yang telah di tetapkan. Dengan kata lain faktor pelayanan dan penanganan pasien yang berobat di RSUD Kota Dumai tidak dapat menekan jumlah angka kematian umum untuk setiap penderita keluar dari Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan standar ideal GDR menurut Depkes 2005 yaitu sebesar : kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien yang keluar dari Rumah Sakit.

f. NDR (Nate Death rate) Angka Kematian 48 Jam setelah di rawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit.

NDR Menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah di rawat untuk tiap tiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit. Indikator ini memberikan gambaran Mutu dan kualitas Pelayanan di Rumah Sakit. Target NDR yang di buat selama tahun 2022 adalah : 24, sedangkan realisasi adalah : 23,23. Dengan Demikian jumlah angka kematian 48 jam setelah di rawat di rumah sakit untuk tiap tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit lebih rendah dari target yang di tetapkan. Hal ini menunjukkan Gambaran mutu dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit membaik.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Kinerja RSUD Kota Dumai Jika dilihat dari Kinerja tahun 2022 telah memperlihatkan kinerja yang baik, dimana capaian kinerja yang ada jika di bandingkan dengan Kinerja lima tahun terakhir rata rata memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat seperti pada Tabel. 3.2.

No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	80	80	80	75	75	83,06	76,58	76,68	76,68	71,15
	ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	3	3	5	4	3,52	4,08	4,54	4,54	4,52
	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,94	1,52	1,53	1,53	1,97
	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	78	65	65	45	45	65,8	56,11	13,88	13,88	53,46
	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	31	30	31	32	34	31,55	36,88	36,25	36,25	42,50
	NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	19	19	20	20	20	18	21,42	23,23	23,23	23,38

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis RSUD Kota Dumai.

Capaian kinerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :dan

Tabel 3.3 : Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta target dan Realisasi Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai Tahun 2022.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang menjangkau seluruh Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur di RSUD (BOR)	%	80	75	75	75	75	75	75
			ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	5	5	5	5	5	
			TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1,5	2	2	2	2	
			BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65	45	45	45	45	45	
			NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	20	20	20	20	20	20	

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.

Realisasi Kinerja Tahun 2022 untuk RSUD Kota Dumai .

Jika di bandingkan Realisasi Kinerja RSUD Kota Dumai tahun 2022 dengan Standar Nasional maka dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	Target/ Standar Depkes
1	2	3				
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	75	71,15	60 - 85
		ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	4	4.52	6 sd 9
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	1.97	1 sd 3
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	45	53,46	40 - 50
		GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	34	42,5	kurang dari 40
		NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	24	23,23	25

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah di lakukan.

Keberhasilan / Peningkatan di topan oleh semakin baiknya Sarana dan Prasarana di RSUD Kota Dumai. Kemudian didukung juga oleh RSUD Kota Dumai sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional yang memungkinkan teralokasinya dana DAK/ APBN.

Kemudian juga RSUD Kota Dumai menjadi Rumah Sakit Kelas B dan telah terakreditasi PARIPURNA. Dimana akreditasi merupakan Jaminan Mutu dalam memberikan Layanan Kesehatan yang terbaik kepada Masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN.

Pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Penjelasan alokasi anggaran persasaran strategis diawali dengan narasi sebagai berikut :

Anggaran belanja langsung pada APBD tahun 2022 Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 319.422.660.025,- yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp. 242.190.818.059,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.255.281.436.558,00 ,- atau 105,41% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

1. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 98.275.900,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.076.000,00,- dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan	: 85,29%.
Anggaran	: Rp. 48.800.000,-
Realisasi	: Rp. 41.619.100,-
Presentase Realisasi	: 85,29%.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penyelesaian Pekerjaan	: 91,28%.
Anggaran	: Rp. 24.955.900,-
Realisasi	: Rp. 22.779.600,-
Presentase Realisasi	: 91,28%.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Penyelesaian pekerjaan	: 84,33%
Anggaran	:Rp. 24.520.000,-
Realisasi	:Rp. 20.677.300,-
Presentase Realisasi	:84,33%

2. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.861.961.712,00,- dengan realisasi sebesar Rp.37.510.478.577,00,- atau 91,80% dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyelesaian Pekerjaan : 91,80%.
 - Anggaran : Rp. 40.861.961.712,-
 - Realisasi : Rp. 37.510.478.577,-
 - Presentase Realisasi : 91,80%.
3. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.600.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.800.000,00,- atau 93,65% dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 93,65%.
 - Anggaran : Rp. 75.600.000,-
 - Realisasi : Rp. 70.800.000,-
 - Presentase Realisasi : 93,65%.
4. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 296.637.400,00,- dengan realisasi sebesar Rp.293.170.000,00,- atau 98,83% dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 98,83%.
 - Anggaran : Rp. 296.637.400,-
 - Realisasi : Rp. 293.170.000,-
 - Presentase Realisasi : 98,83%.
5. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.060.418.979,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.004.772.788,00,- atau 98,52% dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 99,10%.
 - Anggaran : Rp. 929.818.979,-
 - Realisasi : Rp. 921.442.700,-
 - Presentase Realisasi : 99,10%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100%

- | | |
|----------------------|--------------------|
| Anggaran | : Rp. 15.400.000,- |
| Realisasi | : Rp. 15.400.000,- |
| Presentase Realisasi | : 100% |
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- | | |
|------------------------|---------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 93,69% |
| Anggaran | : Rp. 115.200.000,- |
| Realisasi | : Rp. 107.930.088,- |
| Presentase Realisasi | : 93,69% |
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.576.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.600.000,00,- atau 94,74% dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 94,74% |
| Anggaran | : Rp. 37.576.000,- |
| Realisasi | : Rp. 35.600.000,- |
| Presentase Realisasi | : 94,74% |
7. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.351.523.408,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.508.704.228,00,- atau 95,86% dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 91,78%. |
| Anggaran | : Rp. 4.679.400.000,- |
| Realisasi | : Rp. 4.294.628.228,- |
| Presentase Realisasi | : 91,78%. |
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 20,00% |
| Anggaran | : Rp.100.000.000,- |
| Realisasi | : Rp. 20.000.000,- |
| Presentase Realisasi | : 20,00% |
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- | | |
|------------------------|------------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 97,57%. |
| Anggaran | : Rp. 15.572.123.408,- |
| Realisasi | : Rp. 15.194.076.000,- |

Presentase Realisasi : 97,57%.

8. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 335.600.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.344.696,00,- atau 91,58% dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Penyelesaian Pekerjaan : 98,19%.

Anggaran : Rp. 33.560.000,-

Realisasi : Rp. 32.954.175,-

Presentase Realisasi : 98,19%.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Penyelesaian Pekerjaan : 90,85%.

Anggaran : Rp. 302.040.000,-

Realisasi : Rp. 274.390.521,-

Presentase Realisasi : 90,85%.

9. Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 179.073.494.660,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 196.425.490.269,00,- atau 109,69% dengan sub kegiatan :

- Pelayanan dan Peningkatan BLUD.

Penyelesaian Pekerjaan : 109,69%.

Anggaran : Rp. 179.073.494.660,-

Realisasi : Rp. 196.425.490.269,-

Presentase Realisasi : 109,69%.

b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Jumlah program di anggarkan sebesar Rp. 68.380.949.104,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 56.782.292.751,00,- atau 83,04% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

2. Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 54.617.024.368,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.984.831.537,00,- atau 87,48% dengan sub kegiatan :

- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.
Penyelesaian Pekerjaan : 62,62%.
Anggaran : Rp. 12.664.552.572,-
Realisasi : Rp. 7.930.227.348,-
Presentase Realisasi : 62,62%.
- Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
Penyelesaian Pekerjaan : 84,01%
Anggaran : Rp. 951.176.800,-
Realisasi : Rp. 799.076.000,-
Presentase Realisasi : 84,01%
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Penyelesaian Pekerjaan : 93,67%.
Anggaran : Rp. 21.503.511.228,-
Realisasi : Rp. 20.141.310.507,-
Presentase Realisasi : 93,67%.
- Pengadaan Obat, Vaksin.
Penyelesaian Pekerjaan : 99,97%.
Anggaran : Rp. 7.143.670.391,-
Realisasi : Rp. 7.141.660.185,-
Presentase Realisasi : 99,97%.
- Pengadaan Bahan Habis Pakai.
Penyelesaian Pekerjaan : 99,32%.
Anggaran : Rp. 12.054.113.377,-
Realisasi : Rp. 11.972.557.497,-
Presentase Realisasi : 99,32%.
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Penyelesaian Pekerjaan : 99,79%.
Anggaran : Rp. 300.000.000,-
Realisasi : Rp. 299.381.249,-
Presentase Realisasi : 99,79%.

3. Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.529.484.736,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.797.461.214,00,- atau 65,02% dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Penyelesaian Pekerjaan : 59,55%.
Anggaran : Rp. 10.896.000.000,-
Realisasi : Rp. 6.489.092.328,-
Presentase Realisasi : 59,55%

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Penyelesaian Pekerjaan : 98,92%.
Anggaran : Rp. 2.333.484.736,-
Realisasi : Rp. 2.308.368.886,-
Presentase Realisasi : 98,92%.

- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp. 300.000.000,-
Realisasi : -
Presentase Realisasi : -

4. Pada Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 234.440.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.540.000,- atau 14,31% dengan sub kegiatan :

- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Penyelesaian Pekerjaan : 14,31%.
Anggaran : Rp. 234.440.000,-
Realisasi : Rp. 33.540.000
Presentase Realisasi : 14,31%

c. *Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan*

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp. 8.850.892.862,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.7.944.174.786,00,- atau 89,76% yang dialokasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

5. Pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 8.639.105.462,00,- dengan realisasi sebesar Rp.7.753.355.586,00,- atau 89,75% dengan sub kegiatan :
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar.
Penyelesaian Pekerjaan : 89,75% .
Anggaran : Rp. 8.639.105.462,-
Realisasi : Rp. 7.753.355.586,-
Presentase Realisasi : 89,75%.
6. Pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 211.787.400,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.819.200,00,- atau 90,10% dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Penyelesaian Pekerjaan : 90,10%.
Anggaran : Rp. 211.787.400,-
Realisasi : Rp. 190.819.200,-
Presentase Realisasi : 90,10%.

Dari hasil laporan monitoring dan evaluasi triwulan pertama tahun 2022 terhadap program rencana kerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai Tahun 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 320.007.904.095,- Dari jumlah anggaran Rp. 319.422.660.025,- atau 100,28% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

DIREKTUR RSUD KOTA DUMAI

drg. RIDHONALDI
Nip. 19710312 200012 1 007



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
2022**